

G2.1.3.



NASKAH AKADEMIK BAHAN RANCANGAN PERATURAN PEMERINTAH

TENTANG

PENDIDIKAN KEJURUAN

X. 102

irektorat
dayaan

**DEPARTEMEN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
BADAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN**

1985

344.07
NAS

G2.1.3.



NASKAH AKADEMIK BAHAN RANCANGAN PERATURAN PEMERINTAH

TENTANG

PENDIDIKAN KEJURUAN

**DEPARTEMEN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
BADAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN**

1985

KATA PENGANTAR

Naskah yang berada di hadapan pembaca sekarang ini adalah suatu naskah yang dibuat untuk dijadikan dasar pembuatan suatu usul Rancangan Peraturan Pemerintah yang merupakan semacam penjabaran dari Undang-Undang Pendidikan Nasional, yang masih harus diajukan ke Dewan Perwakilan Rakyat untuk disahkan.

Salah satu tugas Badan Penelitian dan Pengembangan Pendidikan dan Kebudayaan (Balitbangdikbud), Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, adalah tugas untuk menghasilkan naskah-naskah tulisan yang dapat dijadikan landasan dalam penentuan kebijaksanaan Pimpinan Departemen, baik dalam bentuk pembuatan keputusan, peraturan (atau rancangan peraturan), ataupun rencana pengembangan.

Naskah yang berada di hadapan pembaca disusun oleh suatu kelompok tokoh-tokoh pendidikan yang telah diminta untuk menyumbangkan pemikiran mereka masing-masing dan bersama pada upaya menghasilkan gagasan-gagasan buat pengaturan bidang pendidikan yang lebih sesuai dengan tuntutan Pembangunan Nasional.

Isi naskah ini, yang hanya merupakan satu dari seperangkat naskah yang sejenis, tentu saja masih dapat disempurnakan. Oleh sebab itulah naskah ini disampaikan kepada pembaca yang terhormat dengan harapan agar pembaca ikut serta mengusulkan perbaikan-perbaikan pada isi naskah.

Tanggapan, dalam bentuk kritikan, saran ataupun gagasan-gagasan baru, diharapkan dialamatkan kepada Kepala Badan Penelitian dan Pengembangan Pendidikan dan Kebudayaan, Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, dengan alamat

JJ. Jend. Sudirman, Senayan
Tromol Pos 297 KBY
Jakarta

Perhatian dan bantuan Bapak/Ibu/Saudara pembaca pada masalah-masalah yang kita hadapi bersama dalam usaha pengembangan pendidikan yang lebih baik bagi para anggota masyarakat kita yang memerlukan kesempatan belajar sangat kami hargai.

Jakarta, 25 September 1985



Harsja W. Bachtiar

Prof. Dr. Harsja W. Bachtiar
Kepala Badan Penelitian dan Pengembangan Pendidikan dan Kebudayaan
Departemen Pendidikan dan Kebudayaan

DAFTAR ISI

	Halaman
PENDAHULUAN	1
BAB I : PEMIKIRAN DASAR	
A. Pengertian Pendidikan Kejuruan	4
B. Ruang Lingkup dan Kedudukan Pendidikan Kejuruan dalam Sistem Pendidikan Nasional	5
C. Peranan Pendidikan Kejuruan dalam Pembangunan Nasional	5
D. Aspek-aspek Kehidupan Bangsa Indonesia yang perlu didukung Pendidikan Kejuruan ...	6
E. Hal-hal Pokok yang harus diperhatikan dalam Pengembangan Pendidikan Kejuruan	7
BAB II : DASAR, ARAH, TUJUAN, DAN STRATEGI	
A. Dasar	11
B. Arah	11
C. Tujuan	11
D. Strategi	12
BAB III : SATUAN, LAMA PENDIDIKAN, DAN JENJANG	
A. Satuan	14
B. Lama Pendidikan	14
C. Jenjang	15
BAB IV : PESERTA DIDIK DAN PENDIDIK	
A. Peserta Didik	16
B. Pendidik	17

BAB	V :	KURIKULUM	
	A.	Pengertian	20
	B.	Struktur Program	21
	C.	Sistem Penyampaian	23
	D.	Pengembangan Kurikulum	24
BAB	VI :	PENILAIAN	
	A.	Pengertian	25
	B.	Aspek yang dinilai	25
	C.	Mekanisme	29
BAB	VII :	SUMBER DAYA	
	A.	Pengertian	30
	B.	Jenis	30
	C.	Pengadaan dan Pendayagunaan	31
BAB	VIII :	PERANAN MASYARAKAT	
	A.	Pengertian	35
	B.	Bentuk Peranan	35
BAB	IX :	PENGELOLAAN PENDIDIKAN KEJURUAN	
	A.	Ruang Lingkup	38
	B.	Perencanaan Tenaga Kerja	38
	C.	Penyelenggaraan Satuan dan Kegiatan Pendidikan Kejuruan	39

D. Pengawasan	42
E. Pengembangan Pendidikan Kejuruan	43
F. Pengelola	43
G. Bimbingan, Penempatan, dan Pelayanan Tenaga Ahli	46
BAB X : PENUTUP	49
DAFTAR ANGGOTA KELOMPOK KERJA	50

PENDAHULUAN

Dalam upaya memantapkan pembinaan dan pengembangan sistem pendidikan nasional, Pemerintah pada awal tahun 1984 telah berhasil menyusun Rancangan Undang-undang tentang Pendidikan Nasional. Rancangan Undang-undang tersebut akan diserahkan kepada Dewan Perwakilan Rakyat untuk memperoleh persetujuan.

Pelaksanaan Undang-undang tersebut perlu didukung oleh seperangkat peraturan perundang-undangan yang lebih operasional untuk setiap jenis dan jenjang pendidikan, termasuk di dalamnya pendidikan kejuruan.

Sehubungan dengan itu, Menteri Pendidikan dan Kebudayaan telah menetapkan kebijaksanaan untuk menyusun naskah akademik sebagai bahan penyusunan rancangan peraturan perundang-undangan sebagai pelaksanaan dari Undang-undang tentang Pendidikan Nasional.

Sebagai tindak lanjut kebijaksanaan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan tersebut, Kepala Badan Penelitian dan Pengembangan Pendidikan dan Kebudayaan membentuk Kelompok Kerja yang bertugas menyusun Naskah Akademik Pendidikan Kejuruan. Di samping itu, dibentuk juga Tim Teknis yang bertugas menunjang kegiatan Kelompok Kerja tersebut.

Dalam menyusun naskah akademik ini, Kelompok Kerja mengadakan serangkaian pertemuan untuk membahas bahan-bahan yang telah disiapkan oleh Tim Teknis sehingga menghasilkan naskah akhir yang diberi judul "Naskah Akademik Pendidikan Kejuruan" Materi naskah ini selanjutnya merupakan bahan masukan bagi penyusunan rancangan peraturan pemerintah di bidang pendidikan kejuruan.

Naskah ini disusun dengan urutan sebagai berikut:

Bab I berisi uraian mengenai pemikiran Dasar yang mencakup penjelasan tentang a) Pengertian Pendidikan

Kejuruan; b) Ruang Lingkup dan Kedudukan Pendidikan Kejuruan dalam Sistem Pendidikan Nasional; c) Peranan Pendidikan Kejuruan Dalam Pembangunan Nasional; d) Aspek-aspek Kehidupan Bangsa yang Perlu Didukung Oleh Pendidikan Kejuruan; dan e) Hal-hal yang Harus Diperhatikan dalam Pengembangan Pendidikan Kejuruan.

Bab II berisi uraian mengenai dasar, arah, tujuan, dan strategi.

Bab III berisi uraian mengenai pengertian, bentuk dan sebutan satuan, serta nama dan jenjang pendidikan kejuruan.

Bab IV berisi uraian mengenai peserta didik dan pendidik yang mencakup pengertian, persyaratan, hak, dan kewajiban peserta didik dan pendidik.

Bab V berisi uraian mengenai kurikulum pendidikan kejuruan yang mencakup pengertian, struktur program, sistem penyampaian, dan pengembangannya.

Bab VI berisi uraian mengenai penilaian yang mencakup pengertian, aspek yang dinilai, dan mekanisme penilaian.

Bab VII berisi uraian mengenai sumber daya yang mencakup pengertian, jenis dan pengadaan, serta penggunaan sumber daya yang berupa tenaga, dana, prasarana dan sarana.

Bab VIII berisi uraian mengenai peranan masyarakat yang mencakup pengertian, bentuk peranan orang tua, masyarakat, dan dunia kerja.

Bab IX berisi uraian mengenai pengelolaan pendidikan kejuruan yang meliputi pengertian, perencanaan tenaga kerja, penyelenggaraan satuan dan kegiatan pendidikan kejuruan, pengawasan, pengembangan, pengelola, bimbingan, serta penempatan dan pelayanan tenaga ahli.

Bab X berisi uraian penutup serta daftar anggota Kelompok Kerja dan Tim Teknis dalam penyusunan Naskah Akademik Pendidikan Kejuruan ini.

BAB I

PEMIKIRAN DASAR

A. PENGERTIAN PENDIDIKAN KEJURUAN

Pendidikan kejuruan adalah bagian terpadu dari sistem pendidikan nasional yang mempersiapkan peserta didik menjadi anggota masyarakat yang memiliki kemampuan mengadakan hubungan timbal balik secara kreatif dan produktif dengan lingkungan sosial, budaya, ekonomi, teknologi, dan alam sekitar, serta memiliki pengetahuan dan keterampilan kejuruan yang sesuai dengan persyaratan berbagai lapangan kerja atau mampu menciptakan kesempatan kerja atau mengikuti pendidikan keprofesional pada tingkat yang lebih tinggi.

Dengan pengertian pendidikan kejuruan itu dimaksudkan agar pendidikan kejuruan mampu menghasilkan tenaga terampil yang terdidik dan terlatih yang mampu mengambil inisiatif, berbuat/berkarya, berani menanggung risiko yang mungkin timbul, serta senantiasa bertindak ekonomis dalam mencapai daya guna dan hasil guna sumber daya yang tersedia.

Pengetahuan dan keterampilan tenaga yang dihasilkan oleh pendidikan kejuruan harus disesuaikan dengan persyaratan kesempatan kerja yang ada dan yang akan diciptakan dalam berbagai sektor pembangunan ekonomi.

Dengan tingkat pengetahuan dan keterampilan yang ada dan didukung dengan kemampuan di bidang administrasi dan disiplin tertentu, tamatan pendidikan kejuruan diharapkan dapat menciptakan atau menumbuhkan watak makarnya, jiwa wiraswasta, dan semangat mandiri. Dengan demikian, diharapkan tamatan pendidikan kejuruan tidak hanya menggantungkan diri terhadap tersedianya kesempatan kerja, melainkan dapat menciptakan

kesempatan kerja atau lapangan kerja baru, baik bagi dirinya sendiri maupun orang lain yang memerlukan.

B. RUANG LINGKUP DAN KEDUDUKAN PENDIDIKAN KEJURUAN DALAM SISTEM PENDIDIKAN NASIONAL

Pendidikan sekolah dalam sistem pendidikan nasional mencakup pendidikan umum, pendidikan kejuruan, pendidikan kedinasan, pendidikan keagamaan, serta pendidikan Angkatan Bersenjata Republik Indonesia. Menurut jenjangnya, pendidikan sekolah terdiri dari pendidikan dasar, pendidikan menengah, dan pendidikan tinggi.

Pendidikan kejuruan merupakan bagian terpadu dari sistem pendidikan nasional yang:

1. merupakan pendidikan bagi tamatan satuan pendidikan sesuai dengan bakat, minat dan kemampuannya, dalam rangka memenuhi kebutuhan tenaga kerja dan pengembangan kesempatan kerja;
2. menyiapkan tenaga kerja berkualifikasi terdidik, terlatih, dan terampil; serta
3. memungkinkan para tamatan yang memenuhi persyaratan untuk mengikuti pendidikan lanjutan.*)

C. PERANAN PENDIDIKAN KEJURUAN DALAM PEMBANGUNAN NASIONAL

Pembangunan nasional pada hakikatnya adalah pembangunan manusia Indonesia seutuhnya dan pembangunan seluruh masyarakat Indonesia berlandaskan Pancasila dan

Catatan:

- *) Untuk selanjutnya, dalam naskah akademik ini yang dibahas hanya dibatasi pada pendidikan kejuruan dalam arti pendidikan sekolah tingkat menengah, sedang pendidikan kejuruan luar sekolah dan pendidikan tinggi dibahas dalam naskah akademik yang lain.

Undang-Undang Dasar 1945 dalam wadah Negara Kesatuan Republik Indonesia untuk mencapai masyarakat adil dan makmur, baik material maupun spritual.

Titik berat pembangunan nasional adalah pembangunan ekonomi. Pembangunan ekonomi tersebut harus diperkuat dengan industrialisasi. Kondisi industri yang berkembang harus didukung oleh pertanian yang kuat.

Sebagai tindak lanjut ke arah industrialisasi perlu adanya alih teknologi dan menciptakan teknologi baru. Dalam hubungan ini diperlukan pengadaan tenaga yang terdidik, terlatih, terampil dan berkualitas tinggi untuk mengisi jabatan atau pekerjaan tertentu di bidang produksi barang dan jasa dalam rangka pelaksanaan pembangunan ekonomi tersebut. Tenaga-tenaga tersebut diharapkan dapat memanfaatkan sumber daya yang ada serta mampu melihat kesempatan untuk memanfaatkan sumber daya.

D. ASPEK-ASPEK KEHIDUPAN BANGSA INDONESIA YANG PERLU DIDUKUNG PENDIDIKAN KEJURUAN

Sesuai dengan tujuan pendidikan nasional, segala aspek kehidupan bangsa Indonesia perlu didukung oleh pendidikan kejuruan. Aspek kehidupan tersebut meliputi hubungan antara manusia dengan dirinya, manusia dengan Tuhan, manusia dengan manusia lainnya, dan manusia dengan alam sekitarnya.

Beberapa aspek kehidupan bangsa Indonesia yang perlu didukung oleh pendidikan kejuruan antara lain ialah sebagai berikut.

1. Dalam bidang agama, pendidikan kejuruan ikut serta mencapai peningkatan keyakinan dan pengalaman agama.
2. Dalam bidang budaya, pendidikan kejuruan ikut serta menghasilkan manusia Indonesia seutuhnya yang mampu menerapkan serta mengembangkan ilmu dan teknologi untuk kepentingan kemanusiaan.

3. Dalam bidang politik, pendidikan kejuruan ikut serta meningkatkan kesadaran hidup berbangsa dan bernegara.
4. Dalam bidang hukum, pendidikan kejuruan ikut serta menghasilkan manusia Indonesia yang memiliki kesadaran dan ketaatan hukum yang baik termasuk menjunjung tinggi etika profesi, mengembangkan peraturan perundang-undangan di bidang perburuhan, usaha, dan kewiraswastaan.
5. Dalam bidang pertahanan dan keamanan, pendidikan kejuruan ikut serta menghasilkan manusia Indonesia yang mampu mengembangkan kemampuan dan kesediaannya untuk berkorban dalam rangka mempertahankan bangsa, negara, dan tanah air.
6. Dalam bidang ekonomi, pendidikan kejuruan ikut serta dalam meningkatkan nilai tambah berbagai sumber daya, mewujudkan produk dan teknologi baru, melaksanakan berbagai kegiatan penelitian, serta mampu mengisi dan mengembangkan kesempatan kerja sehingga terwujud kehidupan yang layak bagi kemanusiaan.
7. Dalam bidang kependudukan dan lingkungan hidup, ikut serta meningkatkan kesadaran untuk mencapai keserasian antara pertumbuhan penduduk dengan pertumbuhan ekonomi, serta menjaga kelestarian alam lingkungan.
8. Dalam bidang pembangunan masyarakat pedesaan pendidikan kejuruan ikut serta meningkatkan kualitas hidup masyarakat pedesaan.

E. HAL-HAL POKOK YANG HARUS DIPERHATIKAN DALAM PENGEMBANGAN PENDIDIKAN KEJURUAN

Hal-hal yang harus diperhatikan dalam pengembangan pendidikan kejuruan antara lain adalah sebagai berikut.

1. Pembentukan Sikap Pancasila

Pendidikan kejuruan harus membentuk dan menumbuhkan manusia Indonesia yang mampu mempertahankan dan mengembangkan nilai-nilai kehidupan bangsa yang berdasarkan Pancasila. Perkembangan ilmu dan teknologi serta semakin eratnya hubungan antarbangsa, di samping membawa akibat positif dapat pula membawa efek negatif, antara lain perubahan dalam sistem nilai. Pendidikan kejuruan harus dapat menumbuhkan kemampuan peserta didik untuk memilih sistem nilai yang sesuai dengan Pancasila.

Dalam pada itu, perlu dikembangkan suatu sistem nilai di lingkungan peserta didik bahwa bekerja merupakan suatu pilihan untuk dapat berperan paling kreatif dalam mengabdikan pada nusa, bangsa, dan negara. Pilihan tersebut dilandasi oleh bakat, minat, dan cita-cita setiap warga negara.

2. Keseimbangan antara Kebutuhan Jasmani dan Rohani

Pendidikan kejuruan harus memperhatikan keseimbangan antara kebutuhan jasmani dengan kebutuhan rohani peserta didik, meskipun pendidikan kejuruan senantiasa berhubungan dengan perangkat keras. Hal ini penting mengingat bahwa pengembangan pribadi peserta didik harus mencakup pertumbuhan semua aspek kehidupan dalam rangka mewujudkan manusia Indonesia seutuhnya sesuai dengan tujuan pembangunan nasional,

3. Perkembangan Ilmu dan Teknologi

Pendidikan kejuruan berorientasi pada dunia kerja. Oleh karena itu, pendidikan kejuruan harus selalu tanggap terhadap perkembangan ilmu dan teknologi serta terapannya. Dengan demikian, pendidikan kejuruan harus selalu dikembangkan sesuai dengan

tuntutan persyaratan kerja dan perkembangan ilmu dan teknologi dengan memperhatikan sasaran antara dalam penerapannya.

4. Pemerataan Manfaat Ilmu dan Teknologi

Pendidikan kejuruan harus mampu pemeratakan manfaat ilmu dan teknologi serta terapannya dengan memperhatikan kondisi alam, sosial, ekonomi, dan budaya lingkungannya dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Dengan demikian, pendidikan kejuruan harus mampu menjadi sumber informasi masyarakat lingkungannya untuk memecahkan persoalan yang dihadapi dengan menggunakan ilmu dan teknologi.

5. Keseimbangan antara Jumlah Tenaga Kerja dengan Kesempatan Kerja.

Pendidikan kejuruan harus dapat menunjang upaya dalam rangka mewujudkan keseimbangan antara penyediaan tenaga kerja dengan kesempatan kerja. Untuk itu perlu diusahakan terwujudnya perencanaan tenaga kerja secara terpadu sehingga terwujud kesesuaian antara jumlah, jenis, dan mutu tenaga yang dihasilkan dengan jumlah kesempatan kerja baik yang telah tersedia maupun yang akan tersedia.

Dalam hubungan ini, pendidikan kejuruan harus ikut berperan secara aktif dalam pengembangan kreativitas untuk memanfaatkan atau mengembangkan kesempatan kerja baru.

6. Pendayagunaan Sumber Daya

Keanekaragaman kondisi sosial, ekonomi, alam, dan budaya penduduk Indonesia memerlukan perencanaan dan pengembangan pendidikan kejuruan yang sesuai

dengan kondisi lingkungan. Hal ini diperlukan agar segala sumber daya yang ada dapat didayagunakan secara optimal dalam kerangka wawasan **Nusantara**.

Penyelenggaraan pendidikan kejuruan memerlukan keanekaragaman tenaga pendidik, sarana, prasarana, dan fasilitas serta menuntut dana yang relatif besar. Oleh karena itu, perlu selanjutnya dijalin kerja sama antara satuan dan kegiatan pendidikan kejuruan dengan dunia kerja, dan masyarakat untuk secara bersama-sama saling mengisi dan bertanggung jawab atas keberhasilan pendidikan kejuruan.

BAB II

DASAR, ARAH, TUJUAN, DAN STRATEGI

A. DASAR

Pendidikan kejuruan sebagai bagian terpadu dari sistem pendidikan nasional berdasarkan Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, dan undang-undang yang mengatur pendidikan nasional.

B. ARAH

Arah pengembangan pendidikan kejuruan adalah pedoman yang digunakan dalam upaya mencapai tujuan pendidikan kejuruan. Sejalan dengan arah pengembangan sistem pendidikan nasional, pendidikan kejuruan diarahkan pada suatu upaya pendidikan yang meningkatkan latihan kejuruan dan penempatan kerja dalam suatu sistem yang utuh dan mantap sehingga terdapat kesinambungan antara dunia pendidikan dan dunia kerja, berlandaskan budaya bangsa dan integritas nasional.

C. TUJUAN

Pendidikan kejuruan sebagai bagian terpadu dari sistem pendidikan nasional bertujuan meningkatkan ketakwaan terhadap Tuhan yang Maha Esa, kecerdasan dan keterampilan, mempertinggi budi pekerti, memperkuat kepribadian, dan mempertebal semangat kebangsaan dan cinta tanah air peserta didik agar menjadi anggota masyarakat yang memiliki kemampuan mengadakan hubungan timbal balik secara kreatif dan produktif, memiliki kemampuan dan keterampilan kejuruan yang sesuai dengan persyaratan berbagai lapangan kerja, serta mampu menciptakan lapangan kerja atau mengikuti pendidikan keprofesian pada tingkat yang lebih tinggi, sesuai dengan kebutuhan pembangunan.

Pendidikan kejuruan harus menghasilkan tamatan yang siap terjun dalam dunia kerja. Tamatan pendidikan kejuruan diharapkan:

1. memiliki kemampuan mengadakan hubungan timbal balik secara kreatif dan produktif dengan lingkungan sosial, budaya, ekonomi, teknologi, dan alam sekitar;
2. memiliki kemampuan terlatih untuk melaksanakan jenis pekerjaan yang menggunakan pengetahuan, prasarana, dan sarana, serta metode baku sesuai dengan persyaratan jabatan;
3. secara sendiri-sendiri ataupun berkelompok mampu melihat kesempatan untuk memanfaatkan sumber daya yang tersedia sehingga mampu mewujudkan berbagai kesempatan kerja;
4. bagi mereka yang memiliki bakat, minat, dan kemampuan dimungkinkan melanjutkan pendidikan keprofesional pada tingkat yang lebih tinggi.

D. STRATEGI

Pendidikan kejuruan harus berorientasi pada penguasaan masa depan dengan membekali peserta didik agar mampu menjawab tantangan pembangunan.

Dengan demikian pendidikan kejuruan harus mampu menciptakan proses belajar mengajar sedemikian sehingga lulusan dapat langsung melaksanakan tugas dalam dunia kerja serta menyesuaikan dirinya terhadap perubahan-perubahan yang terjadi. Oleh karena itu, dalam proses belajar mengajar, pendidikan kejuruan harus mampu membekali peserta didik dengan kemampuan berpikir, pengembangan sikap, dan kemampuan bertindak sehingga peserta didik memiliki kemampuan mengolah lebih lanjut hasil perolehannya. Di samping itu, peserta didik sejak dini

harus telah diperkenalkan secara mendalam dengan dunia kerja melalui praktek lapangan dan magang.

Dengan tingkat pengetahuan dan keterampilan yang diperoleh dan didukung dengan kemampuan di bidang administrasi dan disiplin tinggi, tamatan pendidikan kejuruan harus memiliki jiwa wiraswasta, watak makarya, dan semangat mandiri.

Strategi pengembangan kurikulum pendidikan kejuruan berorientasi pada kelompok, rumpun, dan program pilihan kejuruan.

Kelompok kejuruan adalah kumpulan kegiatan pendidikan kejuruan yang melaksanakan program inti umum yang sama. Rumpun kejuruan adalah kumpulan kegiatan pendidikan kejuruan yang melaksanakan program inti umum dan program inti kejuruan yang sama.

Program pilihan kejuruan adalah kumpulan kemampuan tertentu yang disyaratkan oleh dunia kerja.

BAB III

SATUAN, LAMA PENDIDIKAN, DAN JENJANG

A. SATUAN

1. Pengertian

Satuan pendidikan kejuruan adalah satuan yang merupakan wahana belajar mengajar dalam penyelenggaraan pendidikan kejuruan.

2. Bentuk dan Sebutan

Bentuk penyelenggaraan satuan dan kegiatan pendidikan kejuruan mencakup baik kegiatan menurut tatanan sekolah maupun tatanan lain atas dasar pendidikan yang berkelanjutan, mengarah pada pengakuan pendidikan yang dibakukan.

Bentuk demikian memberi kemungkinan belajar bagi mereka baik yang belum bekerja maupun yang sudah bekerja sehingga penyelenggaraan satuan pendidikan kejuruan dapat mengikuti tatanan sekolah atau tatanan lain seperti belajar jarak jauh maupun tumpang lapis. Dengan demikian akan tercipta keleluasaan gerak dan keluwesan sistem yang mengarah pada pemerataan pemberian kesempatan memperoleh pendidikan kejuruan.

Satuan pendidikan kejuruan disebut Sekolah Menengah Kejuruan.

B. LAMA PENDIDIKAN

Lama pendidikan satuan pendidikan kejuruan ditetapkan berdasarkan keperluan berbagai persyaratan jabatan dengan memperhatikan padat keterampilan dan padat pengetahuan yang harus dikuasai. Lama pendidikan kejuruan memungkinkan adanya ketidakseragaman antara satuan dan kegiatan pendidikan kejuruan satu dengan

lainnya. Hal ini mengingat bahwa persyaratan berbagai jabatan tidaklah seragam tuntutannya terhadap kepadatan pengetahuan dan keterampilannya.

Lama pendidikan ditentukan atas dasar persyaratan kredit yang harus dipenuhi setiap peserta didik untuk setiap persyaratan jabatan dalam dunia kerja.

Peserta didik dapat mengumpulkan kredit dengan jalan mengikuti pendidikan untuk memenuhi persyaratan jabatan lain yang serumpun guna memperoleh pengakuan formal yang lebih tinggi. Pengalaman kerja yang sesuai dengan kejuruan tertentu yang akan diikuti dapat diperhitungkan sebagai kredit. Tata cara pengumpulan dan pengakuan kredit perlu pengaturan lebih lanjut.

C. JENJANG

Jenjang pendidikan kejuruan adalah tahap pendidikan yang berkelanjutan dan ditetapkan berdasarkan tingkat perkembangan pribadi peserta didik serta tingkat kerumitan dan cara penyajian bahan pengajaran.

Pendidikan kejuruan termasuk dalam jenjang pendidikan menengah.

BAB IV

PESERTA DIDIK DAN PENDIDIK

A. PESERTA DIDIK

1. Pengertian dan Sebutan

Peserta didik adalah anggota masyarakat yang telah memenuhi persyaratan yang ditentukan untuk mengikuti kegiatan pada pendidikan kejuruan.

Peserta didik pada pendidikan kejuruan bukan hanya anggota masyarakat yang setelah tamat dari satuan pendidikan tertentu langsung mengikuti kegiatan pada pendidikan kejuruan, tetapi juga mereka yang setelah tamat kemudian bekerja atau mengikuti kegiatan di bidang lain dan baru berminat mengikuti kegiatan pada pendidikan kejuruan. Oleh karena itu, peserta didik tidak terbatas pada usia tertentu.

Khususnya bagi mereka yang telah bekerja, pengaturan ini adalah dalam rangka penyediaan kesempatan seluas-luasnya bagi peserta didik pendidikan kejuruan untuk belajar sepanjang hidup. Peserta didik dimungkinkan mengikuti pendidikan kejuruan yang setara dengan perolehan sebelumnya sebagai akibat dari kemajuan ilmu dan teknologi serta terapannya dalam dunia kerja, atau mengikuti pendidikan kejuruan yang setingkat lebih tinggi. Peserta didik pada satuan dan kegiatan pendidikan kejuruan disebut siswa.

2. Persyaratan

Dalam menerima peserta didik, satuan pendidikan kejuruan tidak membedakan jenis kelamin, agama, suku, usia, latar belakang sosial dan budaya, serta tingkat kemampuan ekonomi. Walaupun demikian, mengingat bahwa pendidikan kejuruan mempunyai ciri-ciri khusus,

perlu diperhatikan beberapa persyaratan untuk menjadi peserta didik pada pendidikan kejuruan, antara lain meliputi pendidikan minimal, bakat, minat, dan kemampuan bidang kejuruan yang dimiliki oleh calon peserta didik.

3. Hak dan Kewajiban

a. Hak

Peserta didik pendidikan kejuruan mempunyai hak:

- 1) mengikuti kegiatan pada pendidikan kejuruan;
- 2) menggunakan sarana, prasarana, dan fasilitas pendidikan dalam rangka mengikuti kegiatan pada pendidikan kejuruan; dan
- 3) memperoleh bantuan baik berupa pemberian fasilitas belajar ataupun pembebasan dari kewajiban tertentu yang menyangkut biaya pendidikan, sepanjang peserta didik yang bersangkutan menunjukkan prestasi belajar yang tinggi, tetapi tidak mampu membiayai pendidikannya ataupun mengikuti program studi langka peminat namun sangat diperlukan dalam pembangunan.

b. Kewajiban

Peserta didik pendidikan kejuruan wajib mengikuti seluruh peraturan yang berlaku di satuan dan kegiatan pendidikan kejuruan seperti bersikap dan bertindak hormat kepada pendidik, memelihara sarana dan prasarana pendidikan, membayar seluruh atau sebagian biaya penyelenggaraan pendidikan, dan mematuhi jadwal kegiatan pendidikan.

B. PENDIDIK

1. Pengertian

Pendidik pada pendidikan kejuruan ialah anggota masyarakat yang bertugas mengajar, membimbing, dan melatih peserta didik untuk mencapai tujuan pendidikan kejuruan.

Berdasarkan pengertian tersebut pendidik pada

pendidikan kejuruan terdiri dari tamatan LPTK maupun anggota masyarakat yang berpengalaman dalam bidang tugasnya dan memenuhi persyaratan. Pendidik yang termasuk pada kelompok terakhir ini dapat berasal dari masyarakat dalam arti luas, termasuk dunia kerja.

Dalam jangka panjang, penyediaan pendidik kejuruan dapat diperoleh dengan memanfaatkan tenaga kerja yang telah berpengalaman luas dalam bidang tugas di dunia kerja, dengan memberikan kewenangan membimbing dan mengajar yang diperoleh melalui tambahan pendidikan dan latihan-latihan pada satuan-satuan pendidikan yang khusus bertugas dan berfungsi untuk keperluan itu.

2. Persyaratan

Anggota masyarakat yang akan menjadi pendidik pada pendidikan kejuruan pada dasarnya harus memenuhi persyaratan umum dan persyaratan khusus. Persyaratan umum pendidik pada pendidikan kejuruan adalah bahwa ia harus memiliki ketakwaan terhadap Tuhan yang Maha Esa, loyal terhadap ideologi dan dasar negara Pancasila serta Undang-Undang Dasar 1945, memiliki minat, dan berdedikasi di bidang pendidikan khususnya pendidikan kejuruan, dan berbudi pekerti terpuji.

Persyaratan khusus yang harus dimiliki oleh pendidik pada pendidikan kejuruan ialah:

- a. berpengalaman dan menguasai bidang tugasnya,
- b. mempunyai kemampuan membimbing, mengajar, dan melatih peserta didik, dan
- c. kondisi fisik/mental menjamin pelaksanaan tugas-tugasnya.

3. Hak dan Kewajiban

Secara umum semua ketentuan di bidang kepegawaian, khususnya yang berkaitan dengan hak dan kewajiban, berlaku bagi pendidik pada pendidikan kejuruan. Secara

khusus hak dan kewajiban pendidik adalah sebagai berikut.

a. Hak

- 1) Memperoleh dan atau menggunakan sarana, prasarana, dan fasilitas pendidikan dalam pelaksanaan tugasnya.
- 2) Memperoleh kesempatan untuk meningkatkan kemampuan profesionalnya.
- 3) Memperoleh pelayanan berupa jaminan kesejahteraan sosial dalam batas yang dimungkinkan.
- 4) Memperoleh pembinaan karir dan prestasi kerja.
- 5) Memperoleh penghargaan yang sesuai dengan dharma baktinya.
- 6) Memperoleh perlindungan hukum dan keamanan dalam melaksanakan tugasnya.

b. Kewajiban

- 1) Melaksanakan tugas yang dibebankan dengan penuh rasa tanggung jawab dan penuh pengabdian.
- 2) Meningkatkan kemampuan profesional sesuai dengan tuntutan perkembangan ilmu pengetahuan, teknologi, pembangunan, dan tuntutan masyarakat bangsa.
- 3) Membina loyalitas pribadi peserta didik, dan masyarakat terhadap ideologi dan dasar negara.
- 4) Menjaga sikap, tingkah laku, dan kepribadiannya dengan mengamalkan Pancasila sesuai dengan Pedoman Penghayatan dan Pengamalan Pancasila.
- 5) Menghormati agama, keyakinan, dan adat istiadat peserta didik dan masyarakat.

BAB V KURIKULUM

A. PENGERTIAN

1. Kurikulum

Kurikulum satuan pendidikan kejuruan adalah seperangkat program belajar mengajar yang berorientasi pada dunia kerja, yang terdiri dari kurikulum inti dan kurikulum pilihan.

2. Kurikulum Inti

Kurikulum inti satuan pendidikan kejuruan adalah seperangkat program belajar mengajar yang terdiri dari program inti umum dan program inti kejuruan.

Program inti umum adalah program yang mengacu pada pencapaian tujuan pendidikan nasional, perubahan nilai dan tata hidup dalam masyarakat sehubungan dengan perkembangan yang terus menerus dari ilmu dan teknologi, serta penguasaan pengetahuan, kemampuan kejuruan, dan sikap yang sesuai yang wajib diikuti oleh semua peserta didik. Program inti umum terdiri dari sejumlah mata pelajaran dasar umum yang diberikan dengan beban belajar yang sama untuk semua kelompok kejuruan.

Program inti kejuruan adalah program yang bertujuan memberikan bekal dasar sikap, pengetahuan, dan keterampilan yang diperlukan dalam mengikuti kurikulum pilihan pendidikan kejuruan. Program inti kejuruan terdiri dari sejumlah mata pelajaran dasar kejuruan yang wajib diikuti peserta didik dalam rumpun kejuruan tertentu. Oleh karena itu, nama mata pelajaran dan masing-masing beban belajar untuk setiap rumpun kejuruan akan berbeda.

3. Kurikulum Pilihan

Kurikulum pilihan satuan pendidikan kejuruan adalah

seperangkat program belajar mengajar yang merupakan program pilihan kejuruan yang disediakan bagi peserta didik dalam rumpun kejuruan yang sesuai.

Program pilihan kejuruan dapat dipilih sesuai dengan bakat, minat, dan kemampuan peserta didik serta kebutuhan pembangunan, baik tingkat daerah maupun tingkat nasional. Program pilihan kejuruan dimaksud, mengacu pada penguasaan kejuruan dengan kompetensi khusus, keilmuan, sikap dan keterampilan profesional yang disyaratkan dunia kerja, serta harus membuka kemungkinan pelaksanaan pendidikan seumur hidup.

Peserta didik pada pendidikan kejuruan selain diwajibkan mengikuti kurikulum inti juga diwajibkan mengikuti kurikulum pilihan tertentu sesuai dengan spesifikasi dari rumpun kejuruan yang dikehendaki.

Kurikulum pilihan disediakan sesuai dengan persyaratan berbagai jabatan kejuruan yang berlaku dalam dunia kerja tanpa mengabaikan kebutuhan lingkungan tempat satuan dan kegiatan pendidikan kejuruan tertentu berlangsung. Apabila diperkirakan terjadi kesenjangan antara kemampuan tamatan pendidikan kejuruan dengan jabatan-jabatan kejuruan tertentu yang terbuka dalam dunia kerja, satuan pendidikan kejuruan dapat membimbing dan mengarahkan para peserta didik untuk mengikuti kurikulum pilihan tertentu guna menutup kesenjangan dimaksud. Hal ini dilakukan melalui bimbingan karir sebagai bagian dari program bimbingan penyuluhan kurikulum pendidikan.

B. STRUKTUR PROGRAM

Penyusunan struktur program kurikulum dan penentuan besarnya kredit untuk setiap program studi (program belajar mengajar) untuk pendidikan kejuruan didasarkan atas hal-hal sebagai berikut.

1. Penentuan Beban Belajar

- a. Satuan beban belajar peserta didik dinyatakan dengan kredit. Kredit adalah ukuran satuan beban belajar peserta didik yang ditentukan oleh jumlah jam pelajaran tatap muka, pekerjaan rumah, dan atau praktek yang dilakukan per minggu per semester.
- b. Jumlah beban belajar (kredit) untuk masa belajar tertentu ditetapkan berdasarkan persyaratan jabatan atau pekerjaan serta pencapaian tujuan pendidikan nasional dan pendidikan kejuruan.

2. Komposisi Program

Komposisi program inti dengan program pilihan kejuruan ditentukan berdasarkan persyaratan berbagai persyaratan jabatan yang ditentukan oleh dunia kerja dan pengembangan kesempatan kerja tanpa mengabaikan tujuan pendidikan nasional.

Program inti umum yang mengacu pada pembentukan manusia Indonesia seutuhnya meliputi enam mata pelajaran, yaitu:

- a. Pendidikan Moral Pancasila;
- b. Pendidikan Agama;
- c. Pendidikan Sejarah Perjuangan Bangsa;
- d. Sejarah Nasional Indonesia dan Sejarah Dunia;
- e. Bahasa dan Sastra Indonesia; dan
- f. Pendidikan Olahraga dan Kesehatan.

Keenam mata pelajaran tersebut wajib diberikan dalam semua kurikulum sekolah menengah kejuruan.

Program pilihan kejuruan mengacu pada penguasaan kejuruan dengan kedalaman tertentu, keilmuan, serta sikap dan keterampilan profesional yang disyaratkannya. Program pilihan kejuruan merupakan program yang dapat dipilih oleh siswa sesuai dengan kemampuan dan minatnya untuk mendapatkan spesialisasi kejuruan tertentu.

Dalam program pilihan kejuruan dimungkinkan adanya mata pelajaran wajib dan mata pelajaran pilihan.

Mata pelajaran pilihan kejuruan ditentukan berdasarkan persyaratan minimal untuk menduduki jabatan yang ada atau mungkin tersedia pada dunia kerja.

3. Jenis Kegiatan Kurikulum

Kegiatan kurikulum meliputi kegiatan-kegiatan intra-kurikuler, kokurikuler, dan ekstrakurikuler.

Setiap mata pelajaran kejuruan mencakup keterpaduan teori dan praktek serta merupakan suatu kesatuan yang bulat dan utuh.

Sesuai dengan tujuan pendidikan kejuruan, pelaksanaan proses belajar mengajar perlu disesuaikan dengan praktek kejuruan pada dunia kerja dalam rangka memperdalam bidang kejuruan dan sekaligus sebagai pengenalan dalam rangka magang. Dengan demikian tamatan akan lebih menguasai bidang pekerjaan yang sesuai.

Unsur-unsur seperti pendidikan kependudukan dan lingkungan hidup, wawasan Nusantara, wiraswasta, pembangunan desa, pendidikan politik, pendidikan persiapan bela negara dan sebagainya dimasukkan dalam mata pelajaran yang sesuai.

Bimbingan karir yang merupakan bagian dari program bimbingan dan penyuluhan diberikan sebagai kegiatan kokurikuler. Bimbingan karir adalah upaya pemberian pedoman dalam kegiatan belajar mengajar yang dikaitkan dengan tuntutan memasuki kehidupan, tata hidup, dan kejadian di dalam kehidupan serta untuk mempersiapkan peralihan dari kehidupan di satuan pendidikan ke dunia kerja atau ke satuan pendidikan yang lebih tinggi.

C. SISTEM PENYAMPAIAN

Yang dimaksud dengan sistem penyampaian, dalam garis besarnya adalah berbagai metode dan teknik sebagai upaya

memberikan pengalaman belajar pada peserta didik untuk mencapai tujuan pendidikan kejuruan.

Sistem penyampaian tersebut meliputi metode penyampaian dengan menggunakan teknologi mutakhir baik menurut tatanan sekolah dengan berkelompok atau perseorangan maupun dengan cara belajar jarak jauh, praktek di dunia industri, magang, dan lain sebagainya.

Ber macam-macam metode mengajar dapat digunakan dalam interaksi dan komunikasi seperti ceramah, tanya jawab, diskusi, peragaan, latihan, praktek, simulasi, eksperimentasi, kerja kelompok, sosiodrama karya wisata, modul, dan sebagainya

D. PENGEMBANGAN KURIKULUM

Pengembangan kurikulum dilakukan agar tidak ada kesenjangan antara program yang diberikan dengan tujuan pendidikan nasional serta persyaratan yang ditentukan oleh dunia kerja dan pengembangan kesempatan kerja.

Untuk itu diperlukan evaluasi secara sistematis, cermat, teliti dan berkelanjutan oleh suatu unit yang bertugas untuk itu. Dalam pengembangan kurikulum pendidikan kejuruan perlu diikutsertakan pihak dunia kerja sehingga tamatannya mendapat pengakuan yang baku pula serta mencegah adanya kesenjangan antara persyaratan yang ditetapkan oleh dunia kerja dengan program belajar yang diberikan kepada peserta didik.

BAB VI

PENILAIAN

A. PENGERTIAN

Penilaian pendidikan kejuruan adalah usaha untuk mengetahui tingkat keberhasilan pendidikan kejuruan dilihat dari kesesuaiannya dengan perencanaan tenaga kerja untuk memenuhi kebutuhan pembangunan baik di tingkat daerah maupun di tingkat nasional. Penilaian dilakukan untuk memperoleh data dan informasi dengan menelaah dan mengkaji serta melakukan pengukuran terhadap semua aspek pendidikan kejuruan dalam rangka penyempurnaan dan pengembangannya serta upaya mencapai pembakuan kejuruan secara nasional.

Aspek tersebut meliputi program, sistem penyampaian, ketenagaan, peserta didik, sarana dan prasarana, dana, manajemen sekolah, dan tamatan.

Keberhasilan pendidikan kejuruan sangat dipengaruhi oleh tingkat keberhasilan peranan dan kaitan seluruh aspek pendidikan kejuruan yang ada. Kelemahan yang terdapat pada salah satu aspek dapat menghambat peranan dan potensi aspek-aspek yang lain sehingga mengakibatkan pencapaian tujuan pendidikan kejuruan menjadi kurang efektif dan efisien. Oleh karena itu, penilaian pendidikan kejuruan perlu dilakukan secara terpadu, cermat, objektif terhadap seluruh aspek, baik sendiri-sendiri maupun peranan dan kaitan masing-masing aspek serta aplikasi seluruh aspek dalam kesatuan sistem.

B. ASPEK YANG DINILAI

1. Program

Penilaian terhadap program belajar dilakukan untuk mengadakan penyesuaian dengan dasar, arah, tujuan, dan strategi pendidikan kejuruan sebagai sub sistem

dari pendidikan nasional. Penilaian terhadap isi diperlukan pula untuk penyesuaian terhadap tuntutan perkembangan ilmu, teknologi, serta kebutuhan pembangunan khususnya kebutuhan tenaga kerja yang setara dengan tingkat juru.

Penilaian terhadap kedalaman isi diarahkan pada komponen-komponen program belajar untuk kesesuaiannya dengan persyaratan jabatan atau pekerjaan pada dunia kerja.

Penilaian yang menyangkut efisiensi diarahkan pada susunan program belajar disesuaikan dengan tujuan pendidikan kejuruan. Hal ini mengingat kaitan program belajar mengajar pendidikan kejuruan dengan keterbatasan sumber daya dan waktu.

2. Sistem Penyampaian

Sistem penyampaian sebagai salah satu bagian dari kurikulum, sangat menentukan keberhasilan pendidikan kejuruan.

Penilaian sistem penyampaian dilakukan untuk mengetahui tingkat keberhasilan dan kemudahan peserta didik memperoleh pengalaman belajar, pendayagunaan sumber daya yang ada secara ekonomis, memberikan kemudahan, baik bagi pendidik maupun peserta didik tanpa menurunkan mutu, kesesuaian program yang diberikan dengan praktek dalam lapangan kerja.

3. Sumber Daya

Penilaian sumber daya diarahkan untuk mengetahui apakah pengadaan dan pendayagunaan sumber daya tersebut dapat mendukung pencapaian tujuan pendidikan kejuruan. Penilaian sumber daya meliputi jenis, jumlah, kualitas, serta sistemnya.

Penilaian terhadap pengadaan sumber daya diperlukan dalam rangka meningkatkan pengadaan sumber daya yang sesuai dengan kebutuhan dalam rangka mendukung pencapaian

target tamatan baik .jumlah maupun mutu yang direncanakan.

Penilaian terhadap pendayagunaan sumber daya diperlukan dalam rangka meningkatkan pendayagunaan sumber daya secara tepat guna, berdaya guna, dan berhasil guna.

4. Pendidik

Tenaga pendidik sebagai salah satu aspek pendidikan kejuruan memegang peranan yang paling menentukan dalam pencapaian tujuan. Pendidik yang memenuhi syarat baik jumlah dan jenis maupun mutunya, sangat mempengaruhi keberhasilan pendidikan kejuruan.

Penilaian secara cermat, objektif, dan berkelanjutan terhadap pengetahuan, keterampilan, sikap, kesejahteraan, karir dan prestasi kerjanya sangat diperlukan dalam rangka meningkatkan mutu profesional dan pengabdian pendidik. Penilaian dari segi jenis dan jumlah diperlukan dalam rangka memenuhi kebutuhan tenaga pendidik sesuai dengan persyaratan yang ditetapkan dan beban tugas yang ada.

5. Peserta Didik

Penilaian terhadap peserta didik diadakan untuk mengetahui tingkat perkembangan peserta didik dalam usaha mencapai tujuan pendidikan kejuruan, dengan memperhatikan persyaratan masuk dan tujuan pendidikan kejuruan.

Penilaian terhadap peserta didik meliputi perkembangan penghayatan sikap dan nilai, pengetahuan dan keterampilan kejuruan, dan kesadaran kewarganegaraan.

Penilaian peserta didik dilakukan secara berkelanjutan, objektif, aplikatif, dan menyeluruh, yaitu pada saat proses belajar mengajar berlangsung (formatif) dan secara berkala (sumatif), yaitu pada setiap akhir semester dan pada saat peserta didik telah menyelesaikan keseluruhan program studi yang disyaratkan.

Penilaian formatif ditujukan untuk mengetahui tingkat keberhasilan peserta didik apakah telah sesuai dengan tolok ukur yang telah ditetapkan. Dalam hubungan ini, penilaian diarahkan untuk mengetahui kemungkinan peserta didik memerlukan bimbingan, baik bimbingan akademis maupun bimbingan kejuruan, atau memerlukan program pengayaan bagi mereka yang berprestasi menonjol.

Penilaian sumatif dilakukan untuk mengetahui tingkat kepadatan pengetahuan dan keterampilan kejuruan yang telah dimiliki atau dikuasainya. Penilaian terhadap peserta didik dalam penguasaan seluruh program studi yang diberikan dilakukan pada saat peserta didik yang bersangkutan telah menamatkannya.

6. Manajemen

Untuk mencapai tujuan pendidikan kejuruan, seluruh aspek yang ada mempunyai saling ketergantungan. Agar keseluruhan aspek dapat berperan serta sesuai dengan kepentingannya, diperlukan perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan, koordinasi, pengawasan dan pelaporan serta hubungan sekolah dengan masyarakat dan dunia kerja.

Penilaian terhadap manajemen satuan dan kegiatan pendidikan kejuruan diperlukan agar selalu ada peningkatan sistem manajemen yang tepat guna, berdaya guna, dan berhasil guna.

7. Tamatan

Tingkat keberhasilan pendidikan kejuruan diukur dari mutu tamatan dalam hubungannya dengan tujuan pendidikan yang bersangkutan, khususnya setelah tamatan tersebut terjun dalam dunia kerja.

Penilaian terhadap tamatan ditujukan untuk mengetahui jumlah tamatan yang dapat terserap dalam dunia kerja dan jumlah yang tidak terserap serta sebabnya.

Hal ini diperlukan dalam rangka penyesuaian program belajar, perencanaan, pelaksanaan, dan pengembangan satuan dan kegiatan pendidikan kejuruan.

C. MEKANISME

Penilaian pendidikan kejuruan perlu dilakukan dengan ukuran dan metode yang telah dibakukan bersama dengan dunia kerja dan dengan metode yang dapat menjamin tingkat kepercayaan hasil sehingga data dan informasi yang diperoleh dapat digunakan sebagai umpan balik bagi penyempurnaan satuan dan kegiatan pendidikan kejuruan.

Penilaian dilaksanakan, baik oleh lembaga pengelola sendiri maupun oleh luar lembaga pengelola. Penilaian oleh lembaga pengelola dilakukan oleh Departemen Pendidikan dan Kebudayaan sebagai penanggung jawab, instansi di luar Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, serta pihak swasta yang mengelola satuan dan kegiatan pendidikan kejuruan yang bersangkutan. Penilaian di luar lembaga pengelola dapat dilakukan oleh pemerintah, lembaga yang dibentuk oleh masyarakat, dan kelompok profesi sebagai perwujudan peran serta aktif masyarakat dalam pembinaan dan pengembangan pendidikan nasional.

Sesuai dengan sifat dan tujuannya penilaian dapat dilakukan secara terus menerus tetapi dapat pula pada saat diperlukan.

Agar hasil penilaian dapat dimanfaatkan secara optimal, Departemen Pendidikan dan Kebudayaan menetapkan sistem informasi penilaian yang menjamin kelancaran dan ketertiban arus informasi dari penilai kepada pengelola satuan dan kegiatan pendidikan.

Di samping itu perlu ditimbulkan kesadaran dan pengertian yang benar dan tulus dari penilai dengan yang dinilai tentang tujuan dan fungsi penilaian dalam keberhasilan pendidikan kejuruan.

BAB VII

SUMBER DAYA

A. PENGERTIAN

Sumber daya adalah unsur penunjang pelaksanaan pendidikan kejuruan yang berwujud tenaga, dana, prasarana, dan sarana yang diadakan dan didayagunakan oleh keluarga, masyarakat, peserta didik, pemerintah, baik sendiri-sendiri maupun bersama-sama.

Penyelenggaraan kegiatan pendidikan kejuruan memerlukan sumber daya yang beraneka ragam dalam jumlah yang relatif besar. Demikian pula, tuntutan terhadap mutu sumber daya selalu berkembang sesuai dengan perkembangan ilmu dan teknologi serta persyaratan kerja dalam dunia kerja.

Dalam pelaksanaan proses belajar mengajar, praktek, kerja nyata, dan atau magang diperlukan keanekaragaman persyaratan tenaga pendidik, baik dalam bidang ilmu maupun praktek kejuruan, keanekaragaman sarana dan prasarana yang keseluruhannya memerlukan dana yang relatif besar.

Pengadaan sumber daya sedapat mungkin diusahakan dari dalam negeri. Pengadaan dari negara asing (luar negeri) hanya dilakukan, apabila memang di dalam negeri tidak ada dan akibatnya tidak memberatkan beban negara.

B. JENIS

1. Tenaga

Tenaga manusia memegang peranan yang paling menentukan keberhasilan pencapaian tujuan pendidikan kejuruan. Tenaga manusia yang ikut serta dalam pelaksanaan proses belajar mengajar, baik secara langsung maupun tidak langsung antara lain terdiri dari peserta didik, termasuk pembimbing praktek kejuruan, laboran,

pustakawan, tata usaha, pengawas, penjaga sekolah dan pengelola lainnya seperti kepala sekolah, perencanaan, peneliti, dan penilai.

2. Dana

Pelaksanaan kegiatan belajar mengajar, termasuk praktek, memerlukan biaya antara lain untuk gaji dan honor pendidik, biaya praktek, pengadaan, dan pemeliharaan sarana dan prasarana.

3. Prasarana

Prasarana yang diperlukan berupa tanah, gedung sekolah, bangunan, dan kelengkapan lainnya sesuai dengan kelompok dan rumpun kejuruan yang ada seperti bengkel atau tempat praktek, laboratorium, ruang perpustakaan, ruang pertemuan, dan tempat olah raga.

4. Sarana

Sarana yang diperlukan berupa peralatan dan bahan untuk praktek kejuruan dan laboratorium, buku pelajaran untuk peserta didik dan pendidik, buku rujukan dan bacaan, buku kurikulum, alat tulis kantor, dan alat lain yang digunakan dalam proses belajar mengajar.

C. PENGADAAN DAN PENDAYAGUNAAN

Pendidikan merupakan tanggung jawab bersama antara pemerintah dengan orang tua, peserta didik, dan masyarakat. Kemampuan pemerintah untuk mengadakan sumber daya tersebut sangat terbatas sehingga perlu pengaturan pengadaan dan penyalanggunaan sumber daya oleh pemerintah, orang tua, dan masyarakat khusus dunia kerja secara terpadu.

1. Tenaga

Pengadaan dan penyalanggunaan tenaga, diusahakan secara khusus oleh pemerintah. Namun demikian, pemerintah dapat mewajibkan:

- a. anggota masyarakat yang memiliki pengetahuan dan atau keterampilan kejuruan menjadi pendidik atau memberikan program studi tertentu;
- b. adanya kerja **sama** antara satuan dan kegiatan pendidikan kejuruan dengan dunia kerja yang memiliki tenaga seperti yang dibutuhkan pendidikan kejuruan, atau antarsatuan dan kegiatan pendidikan yang ada, dalam rangka memperoleh pendidik tidak tetap dengan diberi imbalan tertentu; dan
- c. lulusan perguruan tinggi, khususnya program studi **langkah**, untuk menjadi pendidik.

Sebaliknya, apabila pendidikan kejuruan memiliki tenaga tertentu, masyarakat atau dunia kerja berhak mendapatkan bantuan tenaga tersebut sepanjang tidak mengganggu proses belajar mengajar.

2. Dana

Dana yang diperlukan bagi pembiayaan pendidikan kejuruan diadakan melalui saluran berikut.

- a. Orang tua peserta didik, atau peserta didik yang telah mempunyai penghasilan dengan mewajibkan membayar seluruh atau sebagian biaya pendidikan. Jenis dan besarnya biaya tersebut disesuaikan dengan kemampuan.
- b. Pemerintah, dengan menyediakan anggaran yang diambil dari anggaran pendapatan dan belanja negara.
- c. Dunia kerja yang akan menggunakan tamatan pendidikan kejuruan, dengan mewajibkan dunia kerja untuk memberikan beasiswa kepada peserta didik dan atau dunia kerja dengan mewajibkan untuk menyisihkan sebagian keuntungannya untuk disumbangkan kepada pendidikan kejuruan.

d. Penjualan barang atau jasa yang dihasilkan satuan dan kegiatan pendidikan kejuruan dari kegiatan praktek.

3. Sarana dan Prasarana

Pengadaan sarana, prasarana, dan fasilitas pendidikan kejuruan dilakukan oleh:

- a. pemerintah, melalui anggaran pendapatan dan belanja negara atau bantuan masyarakat;
- b. masyarakat, dengan mengadakan sebagian atau seluruh keperluan pendidikan kejuruan;
- c. dunia kerja, dengan menyediakan secara khusus atau bersama-sama untuk dipergunakan dalam rangka peningkatan mutu tenaga yang bersangkutan;
- d. pendidikan kejuruan, dengan menghasilkan sendiri sekaligus dalam rangka praktek kejuruan tertentu;
- e. peserta didik, dengan kewajiban menyediakan sendiri sebagian yang diperlukan dalam batas peserta didik dan atau kemampuan orang tuanya; dan
- f. satuan dan kegiatan pendidikan kejuruan yang bekerja sama dengan semua satuan dan kegiatan pendidikan lain yang sesuai.

Sarana dan prasarana, yang dimiliki pendidikan kejuruan dapat didayagunakan oleh orang tua, masyarakat, dan dunia kerja serta satuan dan kegiatan pendidikan di sekitarnya, dengan dikenakan kewajiban tertentu misalnya:

- a. membayar seluruhnya atau sebagian dari biaya pengadaan, perawatan, penyusutan, dan pengamanan;

b. mengikuti atau menaati semua peraturan yang berlaku.

Semua sarana, prasarana, dan fasilitas yang ada, misalnya praktek kejuruan atau laboratorium, dapat dimanfaatkan oleh seluruh satuan dan kegiatan pendidikan yang ada disekitarnya dengan pengaturan yang menyangkut perencanaan waktu penggunaan, biaya perawatan, pengamanan dan sebagainya.

. BAB VIII

PERANAN MASYARAKAT

A. PENGERTIAN

Peranan masyarakat adalah keikutsertaan anggota masyarakat sebagai perwujudan tanggung jawabnya dalam pelaksanaan sistem pendidikan nasional, khususnya pendidikan kejuruan, baik secara sendiri sendiri maupun bersama-sama.

Masyarakat yang dimaksud mencakup perorangan, keluarga, kelompok profesi, dunia kerja, lembaga sosial, dan keagamaan.

Keikutsertaan anggota masyarakat, khususnya dunia kerja, diperlukan dalam rangka menunjang keberhasilan pencapaian tujuan pendidikan kejuruan yang meliputi pengadaan dan pengembangan satuan dan kegiatan pendidikan kejuruan, menciptakan suasana yang mendorong efisiensi dan efektivitas proses belajar mengajar, baik di sekolah maupun di rumah, memberikan dorongan atau kemudahan tamatan memperoleh kesempatan kerja atau menciptakan kesempatan kerja dan sebagainya.

B. BENTUK PERANAN

1. Peranan Orang tua Peserta Didik

Orang tua memegang peranan yang sangat menentukan keberhasilan peserta didik, mengingat peserta didik lebih banyak waktunya berada pada lingkungan keluarga daripada waktu yang digunakan dalam proses belajar mengajar di sekolah.

Peranan orang tua peserta didik diwujudkan antara lain dengan cara:

- a. mendorong peserta didik untuk disiplin dalam belajar dan menaati peraturan sekolah serta menumbuhkan kreativitas;

- b. menghindari perilaku atau suasana yang dapat menimbulkan benturan nilai di kalangan peserta didik, serta bertanggung jawab atas tumbuhnya nilai-nilai yang sejalan dengan yang diperoleh di sekolah; dan
- c. membantu menegakkan wibawa pendidik dengan menumbuhkan sikap peserta didik untuk menghormati pendidik; dan
- d. membantu meningkatkan keberhasilan proses belajar mengajar, baik bagi peserta didik maupun satuan dan kegiatan pendidikan kejuruan.

2. Peranan Masyarakat

Sesuai dengan kemampuannya, masyarakat membantu perkembangan pendidikan kejuruan antara lain dengan cara:

- a. mengadakan dan mengembangkan satuan dan kegiatan pendidikan kejuruan sesuai dengan pedoman dan petunjuk yang ditetapkan peraturan perundang-undangan;
- b. mendorong tumbuhnya sistem nilai yang menghargai kerja dan membudayakan kegiatan bekerja sebagai bagian dari tata hidupnya;
- c. memberikan umpan balik terhadap pelaksanaan satuan dan kegiatan pendidikan kejuruan dalam rangka pengembangan mutu pendidikan;
- d. memberikan kesempatan kerja bagi tamatan pendidikan kejuruan dan mendorong kreativitas serta memberikan bantuan yang diperlukan dalam mengembangkan kesempatan kerja baru;
- e. ikut serta meningkatkan kemampuan dan kewibawaan pendidik.

3. Peranan Dunia Kerja

Peranan dunia kerja diwujudkan dalam keikutsertaannya pada perencanaan, penyelenggaraan, pengembangan program satuan dan kegiatan pendidikan, pengendalian mutu yang memungkinkan penilaian kejuruan yang seragam, dan yang dapat menciptakan pembakuan kejuruan secara nasional dalam rangka mewujudkan perencanaan tenaga kerja nasional secara terpadu.

Peranan tersebut merupakan konsekuensi logis dari saling ketergantungan antara satuan pendidikan kejuruan dengan dunia kerja. Peranan dunia kerja antara lain diwujudkan dengan cara:

- a. menyediakan sarana dan prasarana untuk dimanfaatkan oleh satuan pendidikan dalam kaitannya dengan persiapan peserta didik untuk terjun langsung dalam dunia kerja;

- b. menyediakan tenaga profesional untuk dimanfaatkan dalam peningkatan mutu proses belajar mengajar;
- c. menyediakan kesempatan bagi peserta didik pendidikan kejuruan untuk magang;
- d. menyalurkan tamatan pendidikan kejuruan sesuai dengan kebutuhan tenaga kerja serta persyaratan jabatan yang tersedia; dan
- e. ikut serta dan bertanggung jawab dalam penilaian hasil belajar peserta didik pendidikan kejuruan yang mengacu pada taraf pencapaian tujuan satuan pendidikan yang baku secara nasional.

BAB IX

PENGELOLAAN PENDIDIKAN KEJURUAN

A. RUANG LINGKUP

Dalam bab II disebutkan bahwa pendidikan kejuruan merupakan bagian integral dari sistem pendidikan nasional. Dengan demikian pengelolaan pendidikan kejuruan pada dasarnya juga merupakan bagian integral dari pengelolaan sistem pendidikan nasional.

Pengelolaan pendidikan kejuruan adalah suatu usaha untuk mengatur hubungan antara satuan-satuan dan kegiatan pendidikan kejuruan agar merupakan satu keseluruhan gerak yang terpadu sehingga pelaksanaan pendidikan dapat berdaya guna dan berhasil guna dalam upaya mencapai tujuan sistem pendidikan nasional pada umumnya dan tujuan pendidikan kejuruan pada khususnya.

Dalam penentuan kebijaksanaan yang digunakan sebagai pedoman pengelolaan pendidikan kejuruan, di samping hal-hal yang terdapat dalam pendidikan kejuruan itu sendiri dan keadaan dunia kerja, harus diperhatikan juga faktor-faktor di luar pendidikan kejuruan seperti faktor ideologi, politik, ekonomi, sosial, budaya, pertahanan dan keamanan, agama, kepercayaan terhadap Tuhan yang Maha Esa, lingkungan alam setempat, serta faktor jenis dan jenjang pendidikan yang lain. Pengembangan pendidikan kejuruan, sebagai suatu aspek pengelolaan pendidikan kejuruan, bersifat tanggap terhadap tuntutan perkembangan masyarakat, ilmu dan teknologi, serta penerapannya dalam tata kehidupan manusia.

B. PERENCANAAN TENAGA KERJA

Sesuai dengan tujuan pendidikan kejuruan diharapkan menghasilkan tamatan yang sesuai dengan persyaratan-

an kesempatan kerja yang ada dalam berbagai sektor pembangunan ekonomi, baik formal maupun informal. Keberhasilan pendidikan kejuruan diukur dari ter-serapnya tamatan pada dunia kerja, baik dalam mengisi jabatan atau pekerjaan yang tersedia maupun kemampuan menciptakan kesempatan kerja atau melanjutkan pendidikan keprofesian yang lebih tinggi.

Agar tercapai keserasian antara tamatan pendidikan kejuruan dengan penyerapan tenaga kerja, baik jumlah maupun mutunya, perlu dilakukan perencanaan secara terpadu antara pihak yang mengelola pendidikan kejuruan dengan pihak-pihak yang menggunakan tamatan. Untuk itu diperlukan suatu wadah yang bersifat tetap berbentuk Badan Perencanaan Tenaga Kerja Nasional.

Badan tersebut bertanggung jawab terhadap pengumpulan dan pemberian informasi tentang jumlah, mutu, dan tempat kebutuhan tenaga kerja baik yang ada maupun proyeksinya.

Komposisi keanggotaan terdiri dari 50% tenaga profesional dari pihak Pemerintah dan 50% tenaga dari pihak swasta. Agar supaya informasi cepat diperoleh dan disalurkan diperlukan aparat dari pusat sampai ke daerah minimal sampai kabupaten/kotamadya.

Penetapan organisasi dan tata kerja Badan Perencanaan Tenaga Kerja Nasional dilakukan oleh Presiden.

C. PENYELENGGARAAN SATUAN DAN KEGIATAN PENDIDIKAN KEJURUAN

1. Organisasi satuan Pendidikan Kejuruan

Untuk mendukung pencapaian tujuannya, penyelenggaraan satuan pendidikan kejuruan membutuhkan berbagai jenis, jumlah, dan tingkat mutu yang memadai, antara lain terhadap tenaga kependidikan, dana, sarana dan prasarana, serta melibatkan berbagai tenaga ahli, kelompok profesi, baik Pemerintah maupun masyarakat khususnya dunia kerja.

Agar tujuan pendidikan kejuruan dapat dicapai secara tepat guna, berdaya guna, dan berhasil guna, organisasi satuan pendidikan kejuruan terdiri dari:

a. Pimpinan Sekolah

- 1) Kepala Sekolah; dan
- 2) Seorang atau lebih Wakil Kepala Sekolah

b. Pimpinan Unit

- 1) Tata Usaha;
- 2) Bengkel, Studio, dan atau Laboratorium;
- 3) Produksi;
- 4) Perpustakaan;
- 5) Bimbingan dan Penyuluhan meliputi:
 - a) bimbingan kejuruan;
 - b) bimbingan kewiraswastaan;
 - c) penempatan; dan
 - d) pelayanan tenaga ahli.
- 6) Poliklinik

c. Tenaga Fungsional, antara lain ialah:

- 1) guru dan tenaga bimbingan penyuluhan;
- 2) laboran;
- 3) pustakawan; dan
- 4) instruktur.

2. Pengadaan dan Ruang Lingkup

Pengadaan satuan dan kegiatan pendidikan kejuruan didasarkan atas perencanaan kebutuhan tenaga kerja dan pengembangan kejuruan sesuai dengan kebutuhan pembangunan, baik di tingkat daerah maupun di tingkat nasional dengan memperhatikan sumber daya, kondisi sosial, budaya, dan kemampuan pengelolaannya.

Sesuai dengan tujuan pendidikan kejuruan, yaitu mempersiapkan tenaga kerja yang terdidik dan terlatih untuk berbagai

lapangan kerja, pengadaan satuan pendidikan kejuruan perlu memperhatikan perencanaan kebutuhan tenaga kerja agar tamatannya dapat terserap secara maksimal.

Pada dasarnya pendidikan kejuruan diarahkan untuk memenuhi kebutuhan pembangunan baik tingkat daerah maupun tingkat nasional. Oleh sebab itu, perencanaan pendidikan kejuruan harus didasarkan atas kesempatan kerja, baik yang tersedia maupun yang diperkirakan akan tersedia. Perencanaan pendidikan kejuruan ini mencakup rumpun kejuruan, spesialisasi, jumlah yang diperlukan, dan persyaratan mutunya.

Ruang lingkup pendidikan kejuruan didasarkan atas persyaratan jabatan berbagai lapangan kerja dan kesempatan kerja serta persyaratan untuk mengikuti pendidikan keprofesian pada tingkat yang lebih tinggi dalam rangka menunjang kebutuhan pembangunan.

Atas dasar hal-hal tersebut di atas, pengadaan satuan kegiatan pendidikan harus memenuhi syarat:

- a. tamatan pendidikan kejuruan yang memang diperlukan sesuai dengan perencanaan tenaga kerja, baik dalam rangka pembangunan nasional maupun pembangunan daerah, dan tamatan tersebut tidak dapat dihasilkan oleh jenis dan jenjang pendidikan lain yang telah ada;
- b. ketenagaan, prasarana dan sarana, dana, dan peserta didik tersedia secara minimal yang dapat menjamin kelangsungan hidupnya;
- c. pendirinya adalah instansi, yayasan, atau organisasi yang memiliki status badan hukum; dan
- d. mendapat persetujuan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan.

3. Penutup

Menteri Pendidikan dan Kebudayaan dapat menutup satuan dan kegiatan pendidikan kejuruan, apabila setelah dilakukan pengawasan dan penilaian yang teliti dan mendalam, ternyata:

- a. penyelenggaraan satuan dan kegiatan pendidikan kejuruan tidak lagi sesuai dengan dasar dan tujuan pendidikan nasional; dan atau
- b. tamatan satuan dan kegiatan pendidikan kejuruan tersebut sudah tidak diperlukan lagi karena tidak sesuai dengan perencanaan dan kebutuhan tenaga kerja, baik untuk pembangunan nasional maupun pembangunan daerah; dan atau
- c. ketenagaan, prasarana dan sarana, dana, dan peserta didik tidak lagi dapat menjamin kelangsungan hidupnya; dan atau
- d. instansi, yayasan, atau organisasi pengelola dinyatakan tidak mampu lagi, ditutup, atau dibubarkan.

D. PENGAWASAN

Pengawasan terhadap pendidikan kejuruan dilakukan agar tidak terjadi penyimpangan terhadap peraturan perundang-undangan yang berlaku dan menjaga agar upaya pendidikan kejuruan sesuai dengan tujuan.

Pengawasan juga dilakukan untuk membina satuan dan kegiatan pendidikan kejuruan dapat mencapai tingkat pembakuan nasional.

Pengawasan pendidikan kejuruan dalam sekolah menjadi tanggung jawab Menteri Pendidikan dan Kebudayaan dan dilakukan oleh aparatnya berdasarkan ukuran yang telah dibakukan bersama antara pengelola satuan dan kegiatan pendidikan kejuruan dengan dunia kerja. Ukuran tersebut digunakan untuk menentukan tingkat mutu proses belajar mengajar.

Hasil pengawasan digunakan untuk menentukan langkah-langkah pembinaan lebih lanjut seperti perencanaan, pengaturan, akreditasi, termasuk pengembangan dan peningkatan serta penutupan.

E . PENGEMBANGAN PENDIDIKAN KEJURUAN

Perkembangan ilmu dan teknologi serta tuntutan pembangunan dapat mengakibatkan perubahan kebutuhan jumlah maupun mutu tenaga kerja. Perubahan tersebut secara tidak langsung menuntut adanya perubahan pendidikan kejuruan, baik yang menyangkut kurikulum maupun bentuk satuan dan kegiatan pendidikan kejuruan.

Sifat perubahan tersebut dapat dibedakan atas perubahan jangka panjang, yang menyangkut sebagian besar komponen pendidikan yang bersifat mendasar, dan perubahan jangka pendek yang bersifat teknis untuk komponen tertentu saja.

Perubahan yang bersifat mendasar hendaknya dilakukan setelah jangka waktu yang cukup panjang dan didasarkan atas pengamatan dan penelitian yang cermat dan mendalam. Perubahan yang bersifat teknis yang tidak akan mengganggu satuan dan kegiatan pendidikan kejuruan secara keseluruhan dapat dilaksanakan sesuai dengan tuntutan persyaratan kerja, misalnya penggunaan metode baru dalam penggunaan alat peralatan produksi.

Dalam rangka pengembangan pendidikan kejuruan, perlu diadakan unit yang melaksanakan penelitian dan pengembangan. Pelaksanaan kegiatan pengembangan perlu mengikutsertakan dunia kerja.

F. PENGELOLA

1. Presiden

Ruang lingkup kebijaksanaan dasar pendidikan kejuruan yang memerlukan penetapan Presiden adalah hal-hal yang dampaknya akan menyangkut antardepartemen atau lembaga nondepartemen yang belum merupakan tugas pokoknya serta hak dan kewajiban yang mendasar berkaitan dengan dunia kerja dan masyarakat atau seluruh warga negara. Kebijakan dasar tersebut antara lain ialah:

- a. menetapkan bahan yang diperlukan untuk penetapan kebijaksanaan pembangunan pendidikan kejuruan, baik jangka panjang maupun jangka menengah, sebagai bahan penyusunan GBHN;
- b. menetapkan mekanisme kerja pengumpulan keterangan antardepartemen dan lembaga nondepartemen serta pihak-pihak yang berkepentingan dengan pendidikan kejuruan;
- c. peranan pemerintah dan masyarakat, termasuk dunia kerja dalam pengadaan dan pendayagunaan sumber daya pendidikan kejuruan.

2. Menteri

Pada hakikatnya dianut kebijaksanaan bahwa hasil pendidikan dari semua jenis dan jenjang pendidikan harus bermuara pada dunia kerja. Penyelenggaraan satuan dan kegiatan pendidikan dapat dilaksanakan oleh berbagai pihak, baik pemerintah maupun masyarakat. Namun untuk menjamin tercapainya tujuan pendidikan nasional dipandang perlu agar semua bentuk penyelenggaraan satuan dan kegiatan pendidikan berada dalam satu kerangka sistem pendidikan nasional di bawah pengelolaan tunggal oleh Menteri Pendidikan dan Kebudayaan.

Atas dasar pemikiran tersebut di atas, Menteri, sebagai pembantu Presiden dan atas dasar kebijaksanaan pengelolaan sistem pendidikan nasional, mempunyai wewenang:

- a. menetapkan kebijaksanaan umum pelaksanaan pendidikan kejuruan;
- b. menetapkan sistem informasi pendidikan kejuruan atas dasar kebijaksanaan yang ditetapkan Presiden;
- c. membakukan organisasi dan penyelenggaraan, sarana dan prasarana, serta tenaga satuan dan kegiatan pendidikan kejuruan;
- d. mengadakan dan mendayagunakan sumber daya pendidikan kejuruan;

- e. mengatur pemberian bantuan, pengawasan, dan penilaian serta pengembangan satuan dan kegiatan pendidikan kejuruan;
- f. memberi akreditasi satuan dan kegiatan pendidikan kejuruan berikut tamatannya.

3. Pemerintah dan Masyarakat

Pengelolaan satuan dan kegiatan pendidikan kejuruan dilakukan oleh pemerintah dan atau masyarakat (pihak swasta). Satuan dan kegiatan pendidikan kejuruan yang dikelola oleh masyarakat berwujud perguruan swasta nasional yang mengabdikan kepada dunia pendidikan.

Tanggung jawab fungsional pengelolaan Sekolah Menengah Kejuruan berada dan dilaksanakan oleh Departemen Pendidikan dan Kebudayaan; yang bersifat keagamaan dan kedinasan diserahkan oleh Presiden kepada departemen/badan pemerintah lainnya sesuai dengan bidang tugasnya.

Perguruan swasta tersebut harus berbentuk yayasan atau organisasi yang memiliki status badan hukum. Perguruan swasta berhak mengatur hidupnya sendiri asal tidak bertentangan dengan dasar dan tujuan pendidikan nasional.

Satuan dan kegiatan pendidikan kejuruan yang dikelola oleh masyarakat (swasta) yang memenuhi syarat-

syarat, antara lain pembakuan kurikulum, ketenagaan, prasarana, dan sarana yang ditetapkan dalam peraturan akreditasi, dapat diakui status sama dengan sekolah-sekolah pemerintah yang sejenis dan sederajat. Satuan dan kegiatan pendidikan kejuruan yang memenuhi syarat-syarat tertentu dapat memperoleh bantuan dari pemerintah.

Agar tercapai keserasian dan keterpaduan serta masyarakat mendapat manfaat yang sebesar-besarnya dari satuan dan kegiatan pendidikan kejuruan yang dikelola oleh pemerintah dan masyarakat, maka Menteri Pendidikan dan Kebudayaan mengatur persyaratan pendirian dan penutupan, pengawasan, penilaian, dan pengakuan.

G. BIMBINGAN, PENEMPATAN, DAN PELAYANAN TENAGA AHLI

Pendidikan kejuruan memerlukan berbagai jenis sumber daya dan melibatkan kepentingan berbagai pihak antara lain orang tua, masyarakat, kelompok profesi, khususnya dunia kerja, dan pemerintah. Keseluruhannya memerlukan sistem pelayanan terencana, berkelanjutan, dan terpadu antara lain yang menyangkut bimbingan kejuruan, kewiraswastaan, penempatan, dan pelayanan tenaga ahli.

1. Bimbingan kejuruan (vocational guidance)

Tidak semua orang, khususnya calon peserta didik dan peserta didik sendiri, menyadari bakat dan minatnya yang paling tepat untuk menentukan pilihan kejuruan tertentu.

Dalam hal ini, bimbingan kejuruan sangat diperlukan agar setiap peserta didik mendapatkan pendidikan kejuruan yang sesuai, baik untuk kemajuan dirinya maupun kemungkinan karirnya setelah tamat. Bimbingan kejuruan diperlukan untuk:

- a. melakukan seleksi masuk pada pendidikan kejuruan;
- b. menempatkan peserta didik pada kelompok dan rumpun kejuruan yang paling tepat;

- c. membantu mengatasi kesulitan-kesulitan yang dialami peserta didik dalam belajar; dan
- d. memberikan informasi dan pedoman dalam memiliki jenis pekerjaan yang paling tepat.

Mengingat sulitnya memperoleh tenaga ahli dalam bimbingan kejuruan ini, pengadaan dan pendayagunaan tenaga ahli yang bersangkutan dapat diwujudkan dalam suatu bentuk lembaga yang bertugas melayani keperluan peserta didik berbagai satuan dan kegiatan pendidikan kejuruan yang berada di sekitarnya secara bersama.

2. Bimbingan Kewiraswastaan

Dalam rangka mendorong tamatan untuk berusaha secara mandiri atau berwiswasta perlu diberikan bimbingan baik berupa dorongan psikologis maupun petunjuk teknis berwiswasta.

Dorongan psikologis diarahkan untuk menumbuhkan kemampuan mengambil inisiatif, berbuat/berkarya, dan berani menanggung risiko yang mungkin timbul, serta senantiasa bertindak ekonomis dalam mencapai daya guna dan hasil guna sumber daya yang tersedia.

Petunjuk teknis berwiswasta antara lain mencakup cara mengetahui adanya berbagai kesempatan pemilikan jenis usaha, cara memperoleh modal, pengelolaan usaha dan pemasaran, dan teknik produksi yang memadai.

3. Penempatan

Dalam rangka penempatan tamatan pendidikan kejuruan diperlukan informasi tentang pasaran kerja termasuk tamatan pendidikan kejuruan dan kesempatan kerja, baik di tingkat daerah maupun tingkat nasional.

Agar memudahkan dalam penempatan tamatan, setiap satuan dan kegiatan pendidikan kejuruan perlu memiliki informasi yang lengkap tentang jumlah dan mutu tamatan,

jumlah, jenis, dan lokasi kesempatan kerja berikut persyaratannya.

Keadaan seperti itu memerlukan adanya institusi (lembaga) dari tingkat nasional, propinsi, sampai kabupaten/kotamadya, yang sesuai dengan tingkatnya bertanggung jawab terhadap perencanaan, penentuan kebijaksanaan, penempatan, dan akreditasi dan sebagainya terhadap seluruh jenis dan jenjang pendidikan kejuruan.

4. Pelayanan Tenaga Ahli

Pendidikan kejuruan menggunakan berbagai macam perangkat lunak dan perangkat keras serta tamatan dipersiapkan untuk menduduki/melaksanakan berbagai jenis jabatan atau pekerjaan. Oleh karena itu, pendidikan kejuruan di samping membutuhkan sumber tenaga yang berhubungan langsung dalam proses belajar mengajar seperti pada satuan dan kegiatan pendidikan pada umumnya, memerlukan pula keamanan kerja dan tenaga seperti psikolog pekerja sosial, dan ahli kesehatan.

BAB X

PENUTUP

Naskah Akademik Pendidikan Kejuruan ini dirumuskan secara ringkas, tetapi menyeluruh untuk memungkinkan pengaturan yang lebih sesuai (luwes) dengan keanekaragaman sumber daya dan kebutuhan masyarakat, perkembangan ilmu dan teknologi, serta kebutuhan dunia kerja, baik secara nasional maupun regional.

Rumusan ini selanjutnya disampaikan kepada Kepala Badan Penelitian dan Pengembangan Pendidikan dan Kebudayaan untuk dilanjutkan kepada kelompok kerja inti yang bertugas memadukan hasil seluruh kelompok kerja sehingga ada keterpaduan antara naskah akademik sebagai bagian dari sistem pendidikan nasional.

Hasil akhir naskah akademik selanjutnya akan diserahkan kepada kelompok kerja yang diberi tugas menyusun rancangan Peraturan Pemerintah atau Keputusan Presiden sebagai peraturan pelaksanaan Undang-undang Pendidikan Nasional.

Selanjutnya, Ketua Kelompok Kerja Pendidikan Kejuruan mengucapkan terima kasih kepada semua anggota yang telah ikut menyumbangkan pemikiran dan juga kepada Tim Teknis yang telah menyempurnakan konsep sehingga menjadi satu bentuk Naskah Akademik Pendidikan Kejuruan.

KELOMPOK KERJA PENDIDIKAN KEJURUAN

- | | |
|---|--------------------------------------|
| 1. Moegiadi, Dr. | sebagai Ketua merangkap Anggota |
| 2. Suharta, Drs. | sebagai Sekretaris merangkap Anggota |
| 3. Brotosiswojo, Prof.Dr. Benny Soeprapto | sebagai Anggota |
| 4. Purbo, Prof. Ir. Hasan | sebagai Anggota |
| 5. Ruwijanto, Ir. Wahjudi | sebagai Anggota |
| 6. Situmorang, Dr. A.O.B. | sebagai Anggota |
| 7. Soenaryo, Drs., M.Sc. | sebagai Anggota |
| 8. Sugiyo, Drs. | sebagai Anggota |
| 9. Suhartono, Dr. R.B. | sebagai Anggota |
| 10. Suwandi, Dr. Indro S. | sebagai Anggota |

Perpustakaan
Jenderal